

Laporan ini disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2025

PT. BPR Puskopat

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	Jln Jenderal Sudirman No.550 D Km 3.5 Samping Makam Pahlawan Kota Palembang.
Nomor Telepon	(0711) 313 077
Penjelasan Umum	Dalam Hal Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola sudah berjalan dengan baik, Struktur Organisasi belum terpenuhi sepenuhnya karena ketidaklengkapan Direksi, atau hanya ada Direktur Bisnis namun Direksi dan Komisaris tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan Tugas dan Tanggungjawabnya, dibantu dengan Pejabat- Pejabat Lainnya yang menjadi tim supporting guna berjalannya kegiatan Operasional BPR. Kegiatan Operasional berjalan sesuai dengan Prosedur yang sudah ditetapkan oleh Direksi, namun dalam hal kebijakan akan terus dilakukan perubahan atau pembaharuan terkait Prosedur agar dapat disesuaikan dengan Ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku sehingga dapat membenahi BPR lebih baik lagi dari sebelumnya
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3 (Cukup Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR khususnya dalam hal pemenuhan Pengurus yang juga akan mempengaruhi penilaian tata kelola apabila tidak dipenuhi segera mungkin.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1.Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS, 2.Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, 3.Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS,

d

		4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Direksi wajib menindaklanjuti: - temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; - hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. 5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, 7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	NIK	: 1571020211780061
	Nama	: Devid Arsiel
	Jabatan	: Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS, 2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, 3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS, 4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Direksi wajib menindaklanjuti: - temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; - hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. 5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai,

	7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:	
1. Memberikan Pendidikan dan/atau sertifikasi kepada seluruh karyawan untuk perkembangan SDM 2. Melakukan Penghimpunan dana berupa deposito dari pemegang saham sebesar Rp. 1.000.000.000,- paling lambat November 2025 guna Cadangan untuk penambahan modal disetor sampai pada Desember 2025	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK : 1871012410540005
	Nama : D. Rachmad Gultom, SE
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
	(2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
	(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
	a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat.
	b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
	(4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
	(5) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	(6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:
	a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan
	b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
	2. NIK : 1671041307740011
	Nama : Timbang MDJ S SE
	Jabatan : Komisaris

4

Tugas dan Tanggung Jawab	1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. (5) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. (6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat.
Rekomendasi kepada Direksi:	1. Membentuk strategi khusus dalam peningkatan Outstanding Baki Debet (OBD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) 2. Melakukan Tindakan eksekusi jaminan segera mungkin untuk debitur NPL, khususnya pada sebitur an Lina Fitrianty, Isron, dan Neli Herawati. 3. Direksi wajib memastikan seluruh pegawai, termasuk pegawai baru, telah mendapatkan pelatihan intensif APU PPT & PPSPM. 4. Direksi diminta meningkatkan efektivitas pelatihan karyawan terkait etika professional dan manajemen Risiko.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan : Tanggung Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan : Tanggung Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
4.	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan : Tanggung Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
5.	Komite Lainnya
	Tugas dan : Tanggung Jawab
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Independen
				Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	Ya/Tdk
1.									
2.									
3.									

q

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
		Tidak ada	Tidak ada		

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	1871012410540005	D Rachmad Gultom, SE	PT.BPR Puskopat	6,02	6,02
2	1671041307740011	Timbang MDJ S SE	PT. BPR Puskopat	18,07	18,07

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	0953071406460312	DRS HOTMAN SIAGIAN	PT. BPR Puskopat	34,13	34,13
2	1671010303640003	ANGGIAT RICARDO TAGOR R	PT. BPR Puskopat	22,18	22,08
3	1671041307740011	TIMBANG MAMATAR DENNY JULYCIUS	PT. BPR Puskopat	18,07	18,07
4	3273126905570002	REDYA FATMAWATI	PT. BPR Puskopat	8,03	8,03
5	1671012410540005	D RACHMAD GULTOM, SE	PT. BPR Puskopat	6,02	6,02
6	1671115303670005	RONIULI YOSEPHIN	PT. BPR Puskopat	4,02	4,02
7	3273242607530003	RAMLI SIMANJUNTAK	PT. BPR Puskopat	4,02	4,02
8	1671100605500004	MANGANTAR SIAGIAN	PT. BPR Puskopat	3,63	3,63

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	1871012410540005	D Rachmad Gultom, SE	601119	PT.BPR Batanghari	8,42
2	1671041307740011	Timbang MDJ S SE	601119	PT.BPR Batanghari	31,42

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

f

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

f

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	12.000.000,-	2	14.500.000,-
2.	Tunjangan	1	500.000,-		
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya				
	Total Remunerasi				
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	1	6.000.000,-		
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan	1	598.800,-		
4.	Fasilitas Lainnya	1	5.000.000,-		
	Total Fasilitas Lainnya				
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain				

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,16
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,42
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,54
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,90

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24/02/2025	5	Evaluasi dan Pengawasan Rencana Bisnis Bank terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester II 2024
2.	20/03/2025	13	RUPS Tahun Buku 2024
3.	08/08/2025	6	Evaluasi dan Pengawasan Rencana Bisnis Bank terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester I 2025
4.	02/10/2025	6	Evaluasi dan Pengawasan Rencana Bisnis Bank terhadap Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III 2025
5.	05/12/2025	6	Evaluasi Kinerja Keuangan Posisi November 2025 dan Penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026

2

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	1871012410540005	D Rachmad Gultom, SE	5		100 %
2.	1671041307740011	Timbang MDJ S SE	5		100 %

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Peyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
Dalam Proses Penyelesaian	2	-
Total	6	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
		Tidak ada benturan kepentingan							

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
		Tidak ada kegiatan social politik				

Palembang, 17 April 2026
PT. BPR Puskopat



Evalaya GVP
PE MR, Kepatuhan dan APU PPT



D Rachmad Gultom, SE
Komisaris Utama